Doktrina: Journal of Law

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina>

Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak

Integral Penal Policy Approach and Non Penal Policy In Prevention child crime

Beby Suryani*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

*Corresponding Email: bebysuryani07@gmail.com

Abstrak

Anak-anak tidak terbebas dari kemungkinan melakukan perbuatan pidana (kejahatan) sama halnya seperti orang dewasa. Terhadap anak yang terlanjur melakukan kejahatan dibutuhkan upaya penanggulangan yang efektif mengingat anak masa depan anak yang masih panjang. Penelitian ini jenisnya penelitian yuridis normatif dan penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis. Pendekatan integral kebijakan penal dan kebijakan non penal diharapkan mampu mampu menanggulangi masalah kejahatan anak yang sering terjadi di dalam masyarakat. Pendekatan penal dilakukan melalui penerapan hukum pidana sementara pendekatan non penal dilakukan melalui upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan dengan melihat akar masalah kejahatan tersebut.

Kata Kunci: Kejahatan Anak, Pendekatan Kebijakan Penal, Pendekatan Kebijakan Non Penal

Abstract

Children are not free from possibility of doing criminal act just like adults. Children who already doing those terrible criminal act needed effective way to solve the problem considering to their future. The type of this research is juridic normative and this research is anatically descriptive. Penal approach is doing by criminal law application while non penal approach is doing by efforting prevention of criminal act by seeing the root of those criminal behaviour.

Keywords: *Juvenile Delinquency, Penal Policy Approach, Non penal Policy Approach*

How to Cite: Suryani, B. (2018). Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Doktrina: Journal of Law*. **1 (2): 69-89**

PENDAHULUAN

Kejahatan dapat menimbulkan akibat yang merugikan masyarakat. Kerugian ini dapat berupa rusaknya tatanan kehidupan sosial yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat. Kejahatan juga pada akhirnya dapat menyebabkan timbulnya korban harta dan jiwa serta kehormatan. Oleh karena itu, perhatian tentang kebijakan penanggulangan kejahatan dirasakan penting untuk menjamin keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat. (Mahmud Mulyadi, 2008)

Angka kejahatan di Indonesia masih relatif tinggi sehingga ketenangan hidup menjadi barang yang langka. Hukum dianggap masih belum memberikan perlindungan kepada masyarakat karena upaya penegakan hukum belum maksimal. Aparat penegak hukum berada dalam sorotan tajam mengenai efektivitas kerjanya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat karena tingkat keberhasilan penyelesaian kasus-kasus kejahatan masih rendah.

Kejahatan di negara-negara berkembang menurut Lunden sebagaimana yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo, disebabkan oleh :

1. Besarnya jumlah dan sukarnya melakukan pencegahan terhadap

gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota

2. Terjadinya konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan perkembangan kehidupan sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar
3. Semakin mudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya sehingga anggota masyarakat, terutama remajanya mulai kehilangan pola kepribadian atau samar pola untuk menentukan perilakunya. (Soedjono Dirdjosisworo, 1984)

Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal (penerapan hukum pidana) dan pendekatan non penal (pendekatan di luar hukum pidana). Integrasi dua pendekatan ini diisyaratkan dalam diusulkan *dalam United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Hal ini dilatarbelakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Oleh karenanya upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari

persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan.

Pendekatan integral antara *penal policy* dan *non penal policy* dalam penanggulangan kejahatan harus dilakukan karena pendekatan penerapan hukum pidana semata mempunyai berbagai keterbatasan. Terdapat dua sisi yang menjadi keterbatasan hukum pidana ini, yakni :

1. Dari sisi hakikat terjadinya suatu kejahatan. Kejahatan sebagai suatu masalah yang berdimensi sosial dan kemanusiaan disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, jadi hukum pidana tidak akan mampu melihat secara mendalam tentang akar persoalan kejahatan ini bila tidak dibantu oleh disiplin lain. Untuk itulah hukum pidana harus terpadu dengan pendekatan sosial.
2. Keterbatasan hukum pidana dapat dilihat dari hakikat berfungsinya hukum pidana itu sendiri. Penggunaan hukum pidana pada hakikatnya hanya obat sesaat sebagai penanggulangan gejala semata (*kurieren am sympton*) dan bukan alat penyelesaian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyebab penyakitnya. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi setelah

kejahatan terjadi. Artinya hukum pidana tidak memberikan efek pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga hukum pidana tidak mampu menjangkau akar kejahatan itu sendiri yang berdiam di tengah kehidupan masyarakat. (Barda Nawawi Arief (1), 1998)

Keterbatasan pendekatan *penal* dalam upaya penanggulangan kejahatan seperti dikemukakan di atas, harus diikuti dengan pendekatan *non penal*, yang dapat berupa pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa

Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur *non penal* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya suatu kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau mensuburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, maka usaha-usaha *non penal* ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan

dan diefektifkan. (Barda Nawawi Arief (2), 1996)

Anak-anak tidak terbebas dari kemungkinan melakukan perbuatan pidana (kejahatan) sama halnya seperti orang dewasa baik perbuatan pidana itu dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Anak yang dalam proses perkembangan mendapatkan hambatan pemenuhan kebutuhan dan perhatian menyebabkan anak terhambat perkembangannya dan bahkan dapat menyebabkan terganggu mentalnya. Akhirnya dapat menyebabkan anak menjadi pelaku *delinquency*. (Marlina (1), 2009)

Filosofi sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap anak (*emphasized the rehabilitation of youthful offender*) sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih panjang. Terhadap anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yang mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana. (Marlina (1), 2010)

Hal tersebut dapat terwujud dengan melakukan pendekatan integral antara kebijakan penal dan kebijakan non penal dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan latarbelang maka tulisan ini, akan difokuskan yang membahas bagaimana faktor penyebab terjadinya kejahatan anak ? dan bagaimana pendekatan integral kebijakan penal dan non penal dalam menanggulangi kejahatan anak?

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto bahwa Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. (Soerjono Soekanto,1995)

“Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode pencarian asas sesuatu (*inquiry*) secara sistematis dengan adanya penekanan bahwa pencarian ini dimana dilakukan terhadap suatu masalah-masalah yang dapat dipecahkan. (Moh. Nazir,1989) Yang bertujuan untuk mempelajari satu atau

beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya". (Soerjono Soekanto, 1995)

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi "penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah". (Sutrisno Hadi, 2000)

Salah satunya adalah melalui kegiatan ilmiah, seperti penelitian dimana dalam penelitian tersebut akan mencari data atau bahan-bahan yang dapat dipergunakan untuk penulisan ilmiah. Dimana data adalah merupakan gejala yang akan dicari untuk diteliti, gejala yang diamati oleh peneliti dan hasil pencatatan terhadap gejala yang diamati oleh peneliti". (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1979)

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini jenisnya Penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan atau kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. (Johnny Ibrahim, 2008) Bentuk dari hasil penelitian ini akan dituangkan secara deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, (Soerjono Soekanto, 2006),

yang dalam hal ini dibatasi mengenai peranan pengadilan dalam hal penyelesaian sengketa kepemilikan PT. Televisi Pendidikan Indonesia yang memuat klausula arbitrase.

Penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu terjadi. (Soerjono Soekanto, 2006). Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab penelitian. (Sunaryati Hartono, 1994)

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat metode berpikir deduktif ke induktif yang menggambarkan dan menguraikan tentang kebijakan integral penal dan non penal dalam menanggulangi kejahatan anak

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan. Di dalam penelitian hukum, data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan

dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang no 17 tahun 2016 Tentang perlindungan Anak

2. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer, yang terdiri dari :

1. Buku-buku literatur
2. Putusan-putusan pengadilan negeri dan mahkamah agung
3. Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan Pendekatan Integral Penal dan Non Penal dalam Kejahatan Anak
4. Makalah-makalah/laporan penelitian
5. Artikel-artikel, media massa dan internet.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Metode Pengumpulan data ada 2 (dua) yaitu metode studi pustaka (*library research*) dan metode studi lapangan (*field research*).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diperoleh dari studi pustaka (*library research*), peraturan perundang-undangan, catatan hukum, putusan hakim, dikumpulkan dan dikaji guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa data kualitatif, dimana data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran. Akan tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta pandangan informasi untuk menjawab permasalahan.

Analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif, dengan cara penarikan data dari induktif ke deduktif dalam arti apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang

bersangkutan secara tertulis, lisan dan perilaku nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Anak

Sebelum mengetahui apa-apa saja usaha atau upaya dalam menanggulangi kejahatan anak harus dulu diketahui latar belakang penyebab anak melakukan kejahatan tersebut agar nantinya upaya-upaya yang dilakukan dapat berjalan efektif menyelesaikan permasalahan kejahatan anak.

Latar belakang anak melakukan kejahatan, tentu tidak sama dengan latar belakang orang dewasa melakukan kejahatan. Mencari latar belakang atau sebab anak melakukan kejahatan sebagai lingkup dari Kriminologi akan sangat membantu dalam memberi masukan tentang apa yang sebaiknya diberikan terhadap anak yang telah melakukan kejahatan. Artinya, berbicara tentang kejahatan anak tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang anak melakukan kejahatan, dan pada akhirnya dapat menentukan kebutuhan apa yang diperlukan seorang anak dalam memberi reaksi atas kenakalannya. (Nashriana, 2012)

Berikut merupakan teori-teori yang menjelaskan sebab kejahatan anak:

1. Teori Motivasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaknya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995)

Menurut Romli Atmasasmita, bentuk motivasi itu ada dua amcam, yaitu : motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari luar. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar. Motivasi ekstrinsik dan intrinsik dari kejahatan anak, terdiri dari : Romli Atmasasmita, 1983)

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari kejahatan anak adalah :

- 1) Faktor intelegensia
- 2) Faktor usia

- 3) Faktor kelamin
 - 4) Faktor kedudukan anak dalam keluarga
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik dari kejahatan anak adalah :
- 1) Faktor rumah tangga
 - 2) Faktor pendidikan dan sekolah
 - 3) Faktor pergaulan anak
 - 4) Faktor mass media

Intelegensia adalah kecerdasan seseorang. Anak-anak pelaku kejahatan biasanya memiliki tingkat intellegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk melakukan perilaku jahat.

Secara empiris, dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan sampai sejauh mana usia merupakan masalah yang penting dalam kaitan sebab musabab kenakalan, diantaranya adalah hasil penelitian yang dilakukan Wagiati Soetodjo terhadap narapidana anak di lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang pada Tahun 1998, diperoleh data bahwa yang paling banyak melakukan kejahatan adalah mereka yang berusia antara 16 sampai 18 tahun (mencapai jumlah 119

dari 134 orang narapidana anak). (Wagiati Soetodjo, 2006)

Paul W Tappan mengemukakan pendapatnya bahwa kejahatan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan, sekalipun dalam praktiknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kejahatan jauh lebih banyak dari anak perempuan pada batas usia tertentu. Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dari segi kuantitas kejahatan tetapi juga dari segi kualitasnya. Sering kali kita melihat atau membaca dalam mass media, baik media cetak maupun media elektronik bahwa perbuatan kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki seperti; pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, dll. Sedangkan perbuatan pelanggaran banyak dilakukan oleh anak perempuan seperti perbuatan pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan misalnya melakukan persetubuhan diluar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas. (Nashriana, 2012)

Yang dimaksud dengan kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua, dan seterusnya. Mengenai kedudukan anak dalam keluarga ini, De

Creef telah menyelidiki 200 anak narapidana kemudian menyimpulkan bahwa kebanyakan mereka berasal dari *extreme position in the family*, yakni : *first born, last born, dan only child*. Sedangkan hasil penelitian Glueck di amerika Serikat, dimana didapatkan data bahwa yang paling banyak melakukan kenakalan adalah anak nomor tiga dan nomor empat, yakni dari 961 anak nakal, 31,3% diantaranya adalah ketiga dan keempat; 24,6% anak kelima dan seterusnya adalah 18,8%. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Noach terhadap *delinquency* dan kriminalitas di Indonesia, dimana Beliau telah mengemukakan pendapatnya bahwa kebanyakan *delinquency* dan kejahatan dilakukan oleh anak pertama atau anak tunggal atau oleh anak perempuan atau dia satu-satunya di antara sekian saudara-saudaranya. (Romli Atmasasmita, 1983)

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya kejahatan, dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*). Menurut Ny. Moeljatno, *broken home* seperti yang memang telah menjadi pendapat umum menyebabkan

anak sebagian besar melakukan kejahatan, terutama karena perceraian atau perpisahan orang tua yang sangat mempengaruhi perkembangan si anak. Dalam *broken home* pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi. (Wagiati Soetodjo, 2006)

Sekolah adalah tempat pendidikan anak kedua setelah lingkungan keluarga/rumah tangga si anak. Selama mereka menempuh pendidikan di sekolah, etrjadi interaksi antara anak dengan seamanya, juga interaksi antara anak dengan guru. Interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan akibat samping yang negatif terhadap perkembangan mental si anak sehingga anak menjadi *delinkuen*. Hal ini dikarenakan, anak-anak yang masuk sekolah tidak semua berwatak bai, misalnya penghisap ganja *cross boys* dan *cross girls* yang memberikan kesan kebebasan tanpa kontrol dari semua pihak termasuk lingkungan sekolah. Disisi lain, anak-anak yang masuk sekolah ada yang berasal dari keluarga yang tidak begitu memerhatikan kepentingan anak dalam belajar yang kerap kali berpengaruh pada temannya yang lain. Keadaan semacam ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan anak-anak dapat menjadi sumber terjadinya konflik. Konflik

psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi *delinkuen*. (Nashriana, 2012)

Sebenarnya apabila memperhatikan teori kebijakan kriminal yang dikemukakan oleh Marc Ancel, mass media adalah salah satu sarana yang digunakan untuk melakukan pencegahan kejahatan. (Barda Nawawi Arief (3), 1996). Namun dalam kaitan kejahatan anak, mass media justru berpengaruh terhadap timbulnya suatu kejahatan. Hal ini dibenarkan karena mass media dipahami berpengaruh pula terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak anak untuk melakukan kejahatan kadangkala timbul karena pengaruh gambar-gambar, bacaan dan film.

2. Teori Differential Association

Teori yang dikemukakan oleh E. Sutherland ini pada dasarnya memusatkan diri pada proses belajar. Kejahatan seperti juga perilaku lainnya umumnya merupakan sesuatu yang dipelajari. Asumsi yang mendasari teori ini adalah *a criminal act occurs when a situation appropriate for it, as defined by the person, is present*. (Paulus Hadisuprpto, 1997)

Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat

termasuk norma hukum. Proses yang dipelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman atau memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial. (Abintoro Prakoso, 2013)

Teori *Differential Association* mengenai kejahatan menegaskan bahwa : (Abintoro Prakoso, 2013)

1. Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya dipelajari
2. Perilaku kriminal dipelajari dalam association atau interaksi intim dengan mereka yang melakukan kejahatan melalui suatu proses komunikasi
3. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim
4. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembeda
5. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan : menyukai atau tidak menyukai
6. Konflik kultural mendasari proses *differential association* atau pergaulan yang berbeda

7. Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundang-undangan : lebih suka melanggar daripada mentaatinya
 8. *Differential association* ini bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas
 9. Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar
 10. Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, namun perilaku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai tadi karena perilaku non kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai yang sama.
 11. Perbedaan-perbedaan individu hanyalah penting sepanjang itu mempengaruhi *differential association*.
- melainkan juga harus didukung oleh kebijakan non penal yakni upaya pencegahan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan segenap komponen sistem peradilan pidana serta melibatkan peran aktif lingkungan anak mulai dari keluarga, sekolah serta masyarakat. Berikut akan dijelaskan secara rinci mengenai kebijakan penal dan non penal dalam menanggulangi kejahatan anak.

1. Kebijakan Penal (Penerapan Hukum Pidana) dalam Menanggulangi Kejahatan Anak

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana atau penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutkan sebagai *older philosophy of crime control*. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah, atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana. (Abintoro Prakoso, 2013)

Pendekatan Integral Penal Policy dan Kebijakan Non Penal Policy dalam Menanggulangi Kejahatan Anak

Penanggulangan kejahatan anak tidak bisa dilakukan dengan hanya mengandalkan pada kebijakan penal atau dengan penerapan hukum pidana saja

Ada sementara pendapat bahwa terhadap pelaku kejahatan atau para pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat ini pidana merupakan peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu yang seharusnya dihindari. Pendapat ini nampaknya

didasari atas pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau pengenaan penderitaan yang kejam. (Abintoro Prakoso, 2013)

Dasar pemikiran lain adalah adanya paham determinisme yang menyatakan bahwa orang tidak memiliki kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan kemasyarakatannya. Dengan demikian, kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal. Oleh karena itu, si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana. Karena seorang penjahat merupakan jenis manusia khusus yang memiliki ketidaknormalan organik dan mental, maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya tetapi yang diperlukan adalah tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998)

Pandangan atau alam pikiran yang menghapuskan pidana atau hukum pidana seperti dikemukakan di atas menurut Roeslan Saleh adalah keliru. Beliau mengemukakan alasan yang cukup panjang mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana. Adapun intinya adalah sebagai berikut : (Roeslan Saleh, 1971)

1. Perlu atau tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
2. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum, dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Penggunaan hukum pidana atau penal sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan nampaknya tidak menjadi persoalan, hal ini terlihat dalam praktek perundang-undangan selama ini, yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana atau penal merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut

di Indonesia. Penggunaan hukum pidana atau penal dianggap sebagai suatu yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Permasalahannya ialah garis-garis kebijakan atau pendekatan bagaimanakah yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana atau penal itu.

Penanggulangan kejahatan anak melalui kebijakan penal dapat dilihat dari beberapa ketentuan perundang-undangan pidana yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap anak pelaku kejahatan atau tindak pidana sebagaimana akan diuraikan dibawah ini:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terdapat beberapa ketentuan pidana (sanksi pidana) terhadap anak pelaku tindak pidana yakni sebagai berikut:

- 1) Pasal 76C berbunyi setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak."
- 2) Pasal 80 berbunyi (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3

(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

- 3) Pasal 76D berbunyi "setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."

- 4) Pasal 81 berbunyi (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar

rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D. (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal

dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip. (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak

5) Pasal 81 A berbunyi (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan

rehabilitasi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- 6) Pasal 82 berbunyi (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E. (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu)

orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan cip. (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

- 7) Pasal 82A berbunyi (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok. (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. (3) Ketentuan

lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah

2. Kebijakan Non Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan Anak

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “The Prevention of Crime and Treatment of Offenders” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata – mata dengan “penal”. Di sinilah keterbatasan jalur “penal” dan oleh

karena itu, harus ditunjang oleh jalur “nonpenal”. Salah satu jalur “nonpenal” untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan diatas adalah lewat jalur “kebijakan sosial” (social policy). Yang dalam skema G.P. Hoefnagels di atas juga dimasukkan dalam jalur “prevention without punishment”. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan.

Kebijakan non penal dalam menanggulangi kejahatan anak di Indonesia dilakukan melalui upaya diversifikasi dengan pendekatan restorative justice. Merujuk pada Pasal 1 angka 7 UU 11/2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Restorative justice sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi

(kebijakan) dan diversifikasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai diversifikasi dan *restorative justice* dapat dilihat dalam Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

1) Pasal 6

Diversifikasi bertujuan:

1. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

2) Pasal 7 berbunyi (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi. (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

3) Pasal 8 berbunyi (1) Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang

tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing

Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. (3) Proses Diversifikasi wajib memperhatikan:

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

4) Pasal 9 berbunyi (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversifikasi harus mempertimbangkan:

- a. kategori tindak pidana;
- b. umur Anak;
- b. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- c. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

(2) Kesepakatan Diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. tindak pidana ringan;
 - d. tindak pidana tanpa korban; atau
 - e. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.
- 5) Pasal 10 berbunyi (1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. (2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
- a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
 - b. rehabilitasi medis dan psikososial;
 - c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
 - d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
 - e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.
- 6) Pasal 11 berbunyi:
- Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:
- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
 - b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
 - c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) 6 / 52www.hukumonline.com bulan; atau
 - d. pelayanan masyarakat.
- 7) Pasal 12 berbunyi (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi. (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi. (4) Penetapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka Faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat berasal dari dalam diri anak dan juga berasal dari luar diri anak. Latar belakang anak melakukan kejahatan, tentu tidak sama dengan latar belakang orang dewasa melakukan kejahatan. Mencari latar belakang atau sebab anak melakukan kejahatan sebagai lingkup dari Kriminologi akan sangat membantu dalam memberi masukan tentang apa yang sebaiknya diberikan terhadap anak yang telah melakukan kejahatan. Kebijakan integral penanggulangan kejahatan anak harus dilakukan melalui pendekatan kebijakan penal yakni melalui pemberian sanksi pidana seperti yang diatur di dalam UU Perlindungan Anak serta UU Sistem

Peradilan Pidana Anak sementara pendekatan kebijakan non penal dilakukan melalui upaya diversi dan restorative justice.

DAFTAR PUSTAKA

- Barkatullah, A.H. (2010), *Hak-Hak Konsumen*, Abintoro Prakoso, 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika
- Arief, B. N. (1), (1988), *Beberapa Aspek kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- _____ (2), (1996), *Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, badan Penerbit universitas Diponegoro, 1996
- _____ (3), (1996), *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Ibrahim, J, (2008), *teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, Malang, Banyumedia publishing
- Mulyadi, M., (2008), *Criminal Policy*, Medan, Pustaka Bangsa Press
- Dirdjosisworo, S., (1984), *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Bandung, Sinar Baru
- Marlina (1), (2009), *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, PT refika Aditama.
- _____ (2), (2010), *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press
- Nazir, Moh., (1998), *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Muladi dan Arief, B. N., (1998), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni
- Nashriana, (2012), *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers
- Hadisuprpto, P., (1997), *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung, Citra Aditya
- Pembinaan, P. dan Bahasa, P, (1995), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Adi, R., (2000), *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit
- Atmasasmita, R., (1983), *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung, Armico.
- Saleh, R., (1997), *Mencari asas-Asas Umum yang Sesuai untuk Hukum Pidana Nasional*, Kumpulan Bahan Upgrading Hukum Pidana Jilid 2
- Hadi, S., (2000), *Metode Research Jilid I*, Yogyakarta, Penerbit Andi

- Soekanto, S. dan Mamudji, S., (1979), *Peran Penggunaan Perpustakaan di dalam penelitian Hukum*, Jakarta, PDHUI
- Soekanto, S., (1995), *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- _____, (2006) *pengantar penelitian hukum*, Jakarta, UI press
- Hartono, S., (1994), *Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir ke-20*, Bandung, Alumni
- Soetodjo, W., (2006), *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT Refika Aditama